

Kebersihan Kota

Kesadaran Warga terhadap Lingkungan Masih Rendah

Sektor rumah tangga dinilai menjadi penyumbang terbesar pembuangan sampah ke sejumlah sungai yang berdampak pada pencemaran dan menyempitnya sungai di Ibu Kota. Dari 1,9 juta ton sampah per tahun di Jakarta, sekitar 1 juta ton atau sekitar 60 persen berasal dari rumah tangga.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan mengatakan penyebab besarnya jumlah sampah dari sektor rumah tangga yang terbuang di sungai di antaranya adalah ketidaktegasan Pemprov DKI dalam penegakan aturan dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Sanksi tegas terhadap warga yang membuang sampah sembarangan, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam peraturan tersebut, pelaku pembuang sampah sembarangan dikenai sanksi kurungan maksimal enam bulan atau denda 50 juta rupiah.

Namun, sebagian besar warga tidak mengetahui aturan tersebut, dan pihak Pemprov tidak tegas dalam menegakkan perda tersebut. "Tidak semua warga DKI Jakarta mengetahui adanya aturan tersebut. Ini menunjukkan minimnya sosialisasi dinas terkait," kata dia saat inspeksi mendadak di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/11).

Anggota Komisi D lainnya, Farel Silalahi, menyatakan menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan harus segera dilakukan. Pasalnya, setiap harinya volume sampah terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Jakarta.

"Jumlah penduduk DKI saat ini mencapai 10 juta lebih, sedangkan jumlah tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) yang ada tidak bertambah, yakni hanya terdapat tiga, yaitu TPST Bantar Gebang, TPST Cacing, dan TPST Marunda," papar dia.

Menurut Fadel, saat ini yang harus menjadi perhatian utama dalam hal pengendalian sampah ialah penanganan dari hulu, dalam hal ini masyarakat. Selain sampah rumah tangga sebesar 60 persen, 24 persen sampah disumbangkan dari sektor industri dan perkantoran. Sisanya faktor lain, seperti perilaku warga yang kerap membuang sampah di jalan saat melakukan aktivitasnya.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bahrano mengakui produksi sampah mencapai di atas 6.500 ton per hari. Sampah itu sekitar 53 persennya dari limbah rumah tangga, 4 persen dari pasar, 5 persen dari sekolah, dan 38 persen dari perkantoran dan industri.

Untuk itu, pihaknya bersama dinas terkait akan terus berupaya melakukan penegakan hukum dan sosialisasi terkait peraturan larangan membuang sampah sembarangan.

Selain itu, pihaknya mulai mengembangkan fasilitas pengolahan sampah terpadu di dalam kota dengan sistem intermediate treatment facilities (ITF) dan sentra reuse, reduce, recycle (3R).

Tema Konferensi Tunza 2011, yaitu "Reshaping Our Future melalui Green Ekonomi dan Gaya Hidup Berkelanjutan", menurut Boediono, sangat pas menjawab penggunaan teknologi yang tepat untuk mempertahankan ekonomi hijau.

"Sekretaris PBB Jenderal Ban Ki Moon pernah berkata bahwa orang muda tidak hanya pemimpin masa depan, tetapi juga mitra. Karena itu, peserta konferensi dapat aktif terlibat dalam semua diskusi dan kegiatan selama konferensi. Dapat memahami masalah dan memberikan ide-ide inovatif dalam menciptakan ekonomi hijau," kata Wapres.

Sementara itu, di luar dari kegiatan konferensi tersebut, dua kelompok massa melakukan aksi demonstrasi yakni dari HMI dan BEM se-Bandung Raya. Namun, aksi mereka untuk mendekati lokasi konferensi dapat dihalau oleh aparat polisi.

Presiden Mahasiswa UPI Ali Mahfud yang bergabung dalam aksi BEM se-Bandung Raya menyatakan Bandung tidak layak menjadi lokasi konferensi Tunza 2011 karena pemerintah kotanya sudah melakukan tindakan perusakan hutan, termasuk hutan kota Babakan Siliwangi, yang dijadikan hutan dunia.

"Selain itu, Bandung memiliki masalah sampah yang tidak juga kunjung diselesaikan. Setiap hari sedikitnya 1.600 ton sampah dari Kota Bandung dibuang ke TPA tanpa proses pengolahan yang tepat," ujarnya dalam orasi di depan Kebun Binatang Bandung, Jalan Tamansari.